

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2016**

**Maulida Utami**

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
[MaulidaUtami961@gmail.com](mailto:MaulidaUtami961@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to see how Local Own Revenue, Gross Domestic Regional Product and General Allocation Funds on the Financial Self Sufficiency in Regency/Cities in South Kalimantan Province. The population of this study is 13 Regency/Cities in South Kalimantan during 2007-2016.*

*This research is descriptive and quantitative and using secondary data obtained by DJPK and BPS. Analysis technique with multiple linear regression analysis methods.*

*The results of this study indicate that Local Own Revenue impact a positive effect, Gross Domestic Regional Product did not affect, and General Allocation Funds impact a negative impact on the level of Financial Self Sufficiency. Regions with mining mainstay sectors have low Financial Self Sufficiency while areas with non-mining mainstay sector have a high Financial Self Sufficiency*

**Keywords:** *Financial Self Sufficiency, Local Own Revenue, Gross Domestic Regional Product, General Allocation Funds*

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh PAD, PDRB, dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi penelitian ini sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2007-2016.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang didapat dari DJPK dan BPS. Teknik analisis dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh positif, PDRB tidak berpengaruh, dan DAU berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Daerah dengan sektor andalan pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah sedangkan daerah dengan sektor andalan non pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi.

**Kata kunci :** Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, PDRB, DAU

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai suatu wewenang daerah otonom untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan undang-undang. Melalui UU No. 23 Th. 2014 dan UU No. 33 Th. 2004 kebijakan tentang otonomi daerah telah diatur. UU ini diharapkan dapat memberikan celah untuk menggali potensi lokal bagi setiap daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Berjalannya otonomi daerah, diharapkan agar pemerintah daerah memiliki upaya untuk menjalankan roda pemerintahannya secara efisien serta efektif. Hal itu bisa menjadi bahan dorongan agar berpartisipasi masyarakat dalam upaya membangun

daerah. Pembangunan daerah yang baik akan menciptakan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masing-masing daerah. Berhasilnya otonomi daerah diukur dari kemampuan kinerja keuangan daerah.

Menurut Pramita (2015) kinerja keuangan daerah merupakan capaian hasil kerja dibidang keuangan khususnya keuangan daerah yang menggunakan indikator keuangan dan sudah ditetapkan sebelumnya yang tujuannya untuk melihat kemampuan mengelola keuangan suatu daerah. Salah satu pengukuran kinerja keuangan adalah dengan mengukur kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat memperlihatkan hasil seberapa mampu pemerintah untuk membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan masyarakat.

Menurut UU No. 33 th. 2004 PAD merupakan perolehan pendapatan yang didapatkan daerah dan dipungut sesuai dengan aturan perundang-undangan. PAD diharapkan bisa selalu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber keuangan agar bisa menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan kegiatan pembangunan daerah dan keperluan penyelenggaraan pemerintah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat dilaksanakan.

Menurut Bank Indonesia (BI) PDRB merupakan indikator yang penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam rentang waktu tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Ladjin (2008), semakin besar PDRB suatu daerah, semakin besar juga potensi penerimaan daerahnya. Maka, semakin besar pendapatan daerah akan memberikan peluang terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Dana Perimbangan selain digunakan dalam membantu daerah untuk membiayai kewenangannya, juga memiliki tujuan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Tetapi, apabila dana tersebut khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) terlalu banyak dialokasikan kepada daerah maka tentu saja daerah tersebut jadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah pusat sehingga kemandirian keuangan daerahnya tidak terlaksana dengan baik.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan sektor andalan Pertambangan. Lebih dari separo kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai sektor pertambangan yang merupakan sektor andalan. Penghasilan dari sektor pertambangan yang diperoleh dari bagi hasil dan pajak tentu saja akan menjadi sumber pendapatan daerah. Apabila sektor pertambangan ini dikelola dengan baik, tentu saja akan menambah pendapatan bagi daerah tersebut sehingga kemandirian daerah pun dapat tercapai.

Adapun beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PAD, PDRB, dan DAU baik secara individu atau bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?
2. Faktor mana yang paling mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?
3. Apakah ada perbedaan Kemandirian Keuangan Daerah pada daerah penghasil Tambang dan Non Tambang pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

UU No. 23 th. 2014, telah menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan berbagai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Secara signifikan otonomi daerah mampu mengurangi beban pemerintah pusat dan bisa menimbulkan iklim yang kompetitif antar daerah untuk secara kreatif menemukan cara-cara untuk menggali potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya sehingga kemajuan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Selain itu, di era otonomi daerah dapat menjamin ketersediaan keuangan daerah seperti PAD dan Dana Perimbangan melalui penggalan potensi dan pemanfaatan yang efektif sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Sholihin (2015), APBD adalah sebuah dokumen formal sebagai hasil kesepakatan antara badan eksekutif dan badan legislatif yang berisi tentang belanja dan pendapatan. APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang memegang peran penting dalam peningkatan layanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah agar bisa memenuhi kebutuhannya dalam upaya mendukung berjalannya sistem pemerintahan. Kinerja Keuangan Daerah adalah sebuah pencapaian hasil kerja dibidang keuangan daerah yang bertujuan untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Data keuangan daerah sangat penting untuk pengaturan dana publik, layanan publik dan kegiatan pemerintahan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan dan seberapa besar belanja daerah yang digunakan oleh daerah. Analisis data keuangan daerah tersebut, merupakan sebuah informasi yang penting dalam membuat kebijakan-kebijakan mengelola keuangan daerah untuk melihat seberapa mandiri daerah dalam hal keuangannya.

Kemandirian Keuangan Daerah memperlihatkan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah (Halim, 2012).

Rasio Kemandirian :

$$\frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah merupakan sebuah sistem yang sangat tepat untuk administrasi publik. Selain itu, juga bermanfaat untuk menerapkan kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri agar terciptanya pembangunan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD dapat dijelaskan sebagai pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi (Yani, 2008). Realisasi PAD yang tinggi maka penerimaan daerah otomatis akan meningkat, hal ini akan menyebabkan turunnya

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang berkurang maka kemandirian bisa dicapai daerah tersebut.

#### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah jumlah pertambahan bruto semua aktivitas ekonomi suatu wilayah pada rentang waktu tertentu (BPS, 2016). Tinggi nya PDRB yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat juga tinggi. Meningkatnya PDRB akan menyebabkan terdorongnya peningkatan PAD, karena kemampuan membayar masyarakat juga meningkat dalam pembayaran pajak serta retribusi yang merupakan sumber terbesar PAD sehingga berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU menurut Widjaja (2009) adalah bagian terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antardaerah. Besarnya proporsi DAU dan luasnya wewenang dalam pemanfaatannya akan memberikan makna otonomi yang nyata untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah. Jika pengalokasian DAU relatif tinggi maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mandiri karena masih sangat mengandalkan bantuan pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan daerahnya.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel PAD, PDRB dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan merupakan data sekunder. Data bersumber dari literatur-literatur (kepuustakaan) seperti data dari BPS, DJPK serta dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Data panel merupakan analisis data yang digunakan.

#### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Berikut ini adalah variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian:

1. Variabel dependen (Y) yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Adapun rumusnya adalah:  
Rasio Kemandirian :  
$$\frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$
2. PAD adalah sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (dalam rupiah).
3. PDRB adalah semua total nilai tambah barang serta jasa yang merupakan hasil dari semua kegiatan ekonomi (dalam rupiah)
4. DAU adalah dana yang dialokasikan yang tujuannya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar berbagai daerah dalam mendanai keperluan pelaksanaan desentralisasi (dalam rupiah).

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berikut adalah model regresinya:

$$KKD = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln PDRB_{it} + \beta_3 \ln DAU_{it}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Pemilihan Model Regresi Data Panel**  
**Uji *Fixed Effect* (Uji Chow)**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji *Fixed Effect***

<b>Effects Test</b>	<b>Probabilitas</b>
<b>Cross-Section F</b>	<b>0.0000</b>

Sumber: Eviews 9.0

Nilai probabilitas *Cross Section F*  $0.0000 < 0,05$ . Hal ini berarti model *Fixed Effect* lebih cocok digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya, akan dilakukan Uji Hausman untuk melakukan pengujian antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

**Uji *Random Effect* (Uji Hausman)**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji *Random Effect* (Uji Hausman)**

<b>Test Summary</b>	<b>Probabilitas</b>
<b>Cross-section Random</b>	<b>0.0000</b>

Sumber: Eviews 9.0

Nilai probabilitas *Cross section Random*  $0.0000 < 0,05$ . Hal ini artinya diambil keputusan model *Fixed Effect* lebih cocok digunakan. Jadi, penelitian ini lebih cocok menggunakan model *Fixed Effect*.

**Regresi Data Panel**

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Data Panel dengan Model *Fixed Effect***

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>T Statistic</b>	<b>Probabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>3,731164</b>	<b>3,329248</b>	<b>0,0012</b>	
<b>PAD (X1)</b>	<b>0,840633</b>	<b>18,08434</b>	<b>0,0000</b>	<b>Signifikan</b>
<b>PDRB (X2)</b>	<b>-0,078550</b>	<b>-1,785611</b>	<b>0,0768</b>	<b>Tidak Signifikan</b>
<b>DAU (X3)</b>	<b>-0,756324</b>	<b>-5,214281</b>	<b>0,0000</b>	<b>Signifikan</b>
<b>R Squared</b>	<b>0.909910</b>			
<b>F Statistic</b>	<b>76.75989</b>			
<b>Prob (F statistic)</b>	<b>0,000000</b>			
<b>Durbin Watson Stat</b>	<b>1,28036</b>			

Sumber: Eviews 9.0

Diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut:

$$\text{LnKKD} = 3,731164 + 0,840633\text{LnPAD} - 0,078550\text{LnPDRB} - 0,756324\text{LnDAU}$$

Interpretasi dari persamaan diatas :

1. Nilai konstanta 3,731164 artinya apabila semua variabel independen/bebas dianggap konstan atau bernilai nol maka KKD sebesar 3,731164.
2. Nilai koefisien PAD 0,840633 artinya apabila PAD naik 1% maka KKD akan naik 0,840633 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.
3. Nilai koefisien PDRB -0,078550 artinya apabila PDRB naik 1% maka KKD akan turun 0,078550 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.

4. Nilai koefisien DAU -0,756324 artinya apabila DAU naik 1% maka KKD akan turun 0,756324 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.

#### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolonieritas

**Tabel 4**  
**Uji Multikolonieritas**

Correlation			
	PAD	PDRB	DAU
PAD	1,000000	0,652829	0,836111
PDRB	0,652829	1,000000	0,627691
DAU	0,836111	0,627691	1,000000

Sumber: Eviews 9.0

Pada tabel 4, disajikan hasil dari uji multikolonieritas. Korelasi antar variabel independen cukup rendah yaitu  $< 0,90$  dapat disimpulkan model yang dipilih terbebas dari multikolonieritas.

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Eviews 9.0 yang disajikan pada tabel 3 didapatkan nilai statistik Durbin Watson(DW) sebesar 1,28036. Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa model yang digunakan terbebas dari autokorelasi karena nilai statistik DW yang terletak diantara -2 sampai dengan +2.

#### Hasil Pengujian Hipotesis

##### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 3 hasil  $R^2$  0,909910 yang artinya 90,9910% variabel PAD, PDRB, dan DAU mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dan sisanya 9,009% diperjelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

##### Uji F Statistik (Simultan)

Dapat dilihat pada tabel 3 Prob(F-statistic) yang diperoleh sebesar 0,000000  $< 0,05$  di mana penelitian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel PAD, PDRB, dan DAU memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

##### Uji t Statistik (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel 3 maka dapat disimpulkan:

1. PAD dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Disimpulkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti PAD berpengaruh positif secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. PDRB dengan nilai probabilitas  $0,0768 > 0,05$ . Disimpulkan  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti PDRB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. DAU dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Disimpulkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti DAU berpengaruh negatif secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Pencapaian keuangan daerah yang mandiri merupakan suatu tugas pemerintah daerah untuk dapat mengelola pendapatan daerahnya sendiri dengan maksimal. Menigkatnya kemandirian keuangan daerah dapat memperlihatkan bahwa daerah

tersebut telah mandiri dalam mengelola keuangannya melalui cara menggali potensi-potensi pendapatan daerah secara maksimal dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama, PAD, PDRB, dan DAU mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat kesalahan 0,05. Dari ke tiga variabel tersebut, variabel PAD adalah yang paling dominan dan paling berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti PAD cukup berhasil dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

Secara parsial variabel PAD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Apabila suatu daerah memperoleh PAD yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan bantuan eksternal dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka bisa dikatakan daerah tersebut mandiri dari segi keuangannya. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat bisa mengurangi alokasi dana perimbangan kepada daerah tersebut. Pengoptimalan sumber-sumber PAD sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik.

Upaya peningkatan PAD memerlukan inisiatif serta kemauan pemerintah daerah dalam pengoptimalan potensi pendapatan daerah yang telah ada. Pencarian alternatif-alternatif sumber pendapatan harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kekurangan pembiayaannya. Hal tersebut dapat memicu ide kreatifi para pegawai pelaksana dibidang keuangan daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan baik melakukan kerja sama dengan pihak swasta serta pendirian BUMD sektor potensial untuk peningkatan PAD. Perbandingan dengan hasil penelitian milik Dian Budi Susanti dkk memiliki kesamaan hasil secara parsial/individu variabel PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Secara individu variabel PDRB tidak mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun PDRB setiap tahunnya meningkat namun apabila PAD tidak juga mengalami peningkatan maka tentu saja tidak akan mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Perbandingan dengan hasil penelitian milik Taryoko memiliki perbedaan hasil, pada penelitian Taryoko variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

DAU secara parsial memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan bantuan transfer pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Seharusnya, pemberian DAU hanya menjadi pendukung dalam pelaksanaan dan pembangunan daerah. Arah DAU yang negatif yang artinya apabila DAU naik maka kemandirian keuangan daerah akan turun. Perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu milik Dian Budi Susanti dkk memiliki persamaan variabel DAU memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Salah satu sektor andalan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pertambangan. Pertambangan yang dikelola daerah dengan baik tentu saja akan menjadi sumber pendapatan daerah yang menjanjikan. Bagi hasil dan pajak yang diperoleh dari pertambangan akan masuk ke dalam kas daerah, sehingga pendapatan daerah naik dan kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Berikut disajikan data rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

**Tabel 5**  
**Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>Banjar</b>	<b>10,85</b>
<b>Barito Kuala</b>	<b>4,29</b>
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>7,43</b>
<b>Hulu Sungai Tengah</b>	<b>6,86</b>
<b>Hulu Sungai Utara</b>	<b>6,78</b>
<b>Kota Baru</b>	<b>8,57</b>
<b>Tabalong</b>	<b>6,65</b>
<b>Tanah Laut</b>	<b>9,78</b>
<b>Tapin</b>	<b>4,96</b>
<b>Kota Banjar Baru</b>	<b>11,33</b>
<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>14,15</b>
<b>Balangan</b>	<b>4,79</b>
<b>Tanah Bumbu</b>	<b>7,00</b>

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)*

Menurut BPS Prov. Kalimantan Selatan daerah dengan sektor andalan pertambangan seperti Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tabalong, Tanah Laut, Tapin, Balangan, dan Tanah Bumbu dan sisanya merupakan daerah dengan sektor andalan non pertambangan seperti Kabupaten .HSS, HST, HSU, Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Tetapi pada kenyataannya, daerah dengan sektor andalan non pertambangan seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru secara rata-rata dari tahun 2007-2016 memperoleh kemandirian keuangan daerah tertinggi. Daerah dengan sektor andalan pertambangan seperti Kabupaten Balangan secara rata-rata dari tahun 2007-2016 hampir menjadi daerah dengan kemandirian keuangan daerah terendah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Secara bersama-sama variabel PAD, PDRB, dan DAU mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Secara parsial/individu variabel PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. dan merupakan variabel yang paling signifikan.
3. Secara parsial/individu variabel PDRB tidak mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Secara parsial/individu variabel DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah dengan sektor andalan pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah sedangkan daerah dengan sektor andalan non pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi.



### **Saran**

1. Pemerintah daerah jangan hanya mengandalkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat saja, seharusnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk menaikkan penerimaan dan mempergunakan anggaran secara efektif dan efisien.
2. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan dan meningkatkan PAD. Dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan komponen terbesar dalam PAD, daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan agar terhindar dari penyalahgunaan perolehan PAD.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penambahan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan rentang waktu pengamatan diperpanjang sehingga hasilnya lebih tepat dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. [www.kalsel.bps.go.id](http://www.kalsel.bps.go.id)
- Bank Indonesia. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Halim. A. “*Akuntansi Keuangan Daerah*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. “*Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah*”. Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pramita, Puput Risky. 2015. “*Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013*”. Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta
- Susanti, Dian Budi dkk. 2016. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (studi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010-2014)*”. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom
- Sholihin, Mahfud dan Dwi Ratmono. 2015. “*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*”. Yogyakarta: UPT STIM YKPN
- Taryoko. 2016. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Widjaja, H. A.W. 2009. “*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*”. Jakarta : Rajawali Pers
- Yani, Ahmad. 2008. “*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada